

Keberhasilan *Emerging Market* Koalisi Negara Berkembang WTO Memblokir *Joint-Proposal AS-UE KTM Cancun 2003*

Nur Inna Alifiyah

*Departemen Hubungan Internasional
Universitas Airlangga*

ABSTRAK

Artikel ini membahas keberhasilan negara berkembang yang tergabung di G20 dalam memblokir joint proposal Amerika Serikat (AS)-Uni Eropa (UE) pada Konferensi Tingkat Menteri (KTM) V WTO Cancun, Meksiko. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada kecenderungan dari negara-negara berkembang yang selalu mengalami kekalahan di setiap perundingan WTO terutama yang berkaitan dengan penerapan Agreement on Agriculture (AoA). Belajar dari kesalahan tersebut, negara-negara berkembang kemudian membentuk koalisi yang lebih efektif dalam mengakomodasi kepentingan mereka. Tulisan ini dikaji dengan menggunakan konsep koalisi dan emerging market sebagai kerangka penjelas. Koalisi menurut Narlikar (2005) merupakan salah satu instrumen yang akan mampu meningkatkan posisi tawar dari negara berkembang dalam negosiasi. Keberhasilan koalisi (G20) WTO dalam memblokir joint proposal disokong oleh keberadaan emerging market sebagai faktor pendukung.

Kata-Kata Kunci: *Agreement on Agriculture, G20, emerging market, WTO*

Article aim is the success of the G20 in blocking the joint USA-UE proposal on Ministerial Conference V WTO Cancun, Mexico 2003. The background of this paper is based on the fact that developing countries always tend to loose in every WTO negotiations, especially those related to the implementation of Agreement on Agriculture (AoA). Learned from the fault experience, the developing countries started a more effective coalition accommodated their disregarded interest. Using the concept of coalition and emerging markets as an explanatory framework examine this paper. Coalition, according to Narlikar (2005) is an instrument that will improve the bargaining position of developing countries in the negotiations. The success of coalition (G20) in blocking the joint proposal of USA-EU during Ministerial Conference V WTO Cancun, Mexico 2003 was supported by the existence of emerging markets.

Keywords: *Agreement on Agriculature, Coalition (G20), Emerging markets, WTO*

Berakhirnya Perang Dingin mendorong negara-negara dunia ketiga merdeka dan lepas dari kolonialisme. Peristiwa ini juga berdampak terhadap perubahan sistem internasional. Terlihat dari munculnya Amerika Serikat sebagai kekuatan tunggal dan mulai terintegrasinya negara-negara baru merdeka ke dalam organisasi-organisasi internasional. Sebagai negara 'pemenang' Perang Dingin, Amerika Serikat mampu menguasai serta meletakkan fondasi pengaruh ideologinya dengan membentuk struktur sistem internasional dan beberapa IGO (*international governmental organization*), seperti IMF, Bank Dunia, dan World Trade Organization WTO (Karns & Mingst 2004). Satu di antara organisasi internasional yang mendapat pengaruh AS adalah WTO. WTO merupakan organisasi perdagangan yang memiliki tujuan untuk mengatasi masalah perdagangan antarnegara serta memfasilitasi perundingan dengan menyediakan forum negosiasi permanen sesudah berakhirnya era GATT (General Agreement on Tariff and Trade). Upaya WTO mengatasi masalah perdagangan dunia dan menciptakan perdagangan dunia yang adil serta menguntungkan bagi semua anggota pada faktanya tidak terwujud. Keberadaan WTO tidak sepenuhnya memberikan manfaat dan mewakili kepentingan semua anggota karena aturan dan ketentuan yang tertuang dalam WTO justru memberikan kerugian bagi negara anggota, terutama negara-negara berkembang. Lebih lanjut Stiglitz (2003) menyebutkan bahwa aturan perdagangan bebas di WTO pada dasarnya bersifat tidak adil dan diskriminatif, seperti ketimpangan yang terjadi dalam kasus perdagangan komoditas pertanian. Hal ini didasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam kesepakatan pertanian yang sebagian besar merugikan negara-negara berkembang dengan aturan pembatasan subsidi dan tarif. Hal mendasar dari terjadinya ketimpangan tersebut diperjelas dengan sikap negara-negara maju yang dimotori Amerika Serikat-Uni Eropa dalam mendesak negara berkembang untuk membuka pasar mereka dengan tuntutan penghapusan hambatan perdagangan tarif dan non-tarif, penghapusan subsidi domestik, serta subsidi ekspor di negara berkembang. Sementara negara-negara maju masih mempertahankan sikap proteksionisme dalam melindungi pasar dan petaninya. Di samping itu lemahnya posisi tawar negara berkembang dalam Konferensi Tingkat Menteri (sebelum Putaran Doha) menyebabkan setiap keputusan perdagangan dunia berada dalam dominasi negara-negara maju.

Partisipasi negara berkembang dalam WTO menjadi yang terbanyak dengan mencapai tujuh puluh lima persen dari keseluruhan anggota tetap, terhitung dari 160 anggota tetap saat ini kurang lebih 117 di antaranya merupakan negara berkembang (WTO 2003). Akan tetapi, banyaknya jumlah anggota tersebut tidak memberikan kekuatan lebih bagi negara berkembang untuk mempengaruhi negosiasi yang masih didominasi oleh negara maju. Meskipun organisasi dioperasikan dalam bentuk *one country one vote*, serta keputusan dibuat secara konsensus, dalam realitanya negosiasi dan proses pengambilan keputusan jauh lebih kompleks dan rentan terhadap pengaruh kekuatan ekonomi. Salah satu ukuran daya tawar diterimanya sebuah konsensus dalam WTO ditentukan oleh kombinasi populasi dari populasi, kekayaan dan volume perdagangan (khususnya melalui tingginya PDB per kapita dan volume impor). Sehingga melihat penentuan daya tawar tersebut, maka dapat dipastikan negara-negara maju seperti AS dan UE memiliki peran dominan dalam pengambilan keputusan (Jones 2009). Di samping itu adanya klasifikasi dalam WTO menjadi beberapa kelompok seperti negara maju, negara berkembang, negara kurang maju, dan *net food-importing developing countries* (NFIDCs) berdampak pada adanya perbedaan posisi dan kekuatan negara di tiap negosiasi pengambilan keputusan. Negara yang memiliki kekuatan besar cenderung memiliki kesempatan lebih besar untuk memengaruhi dan menguasai proses pengambilan keputusan. Sehingga dengan adanya dominasi tersebut berdampak kerugian yang ditanggung oleh sebagian anggota, karena isu yang diputuskan tidak sepenuhnya memberikan manfaat bagi negara anggota lainnya. Negara berkembang memang tidak tinggal diam begitu saja dalam tiap negosiasi, namun tarik ulur kepentingan yang terjadi dalam WTO justru berimbas pada ketidakjelasan dan lambannya pengambilan keputusan. Ini dapat dilihat dari lambannya proses penyelesaian kesepakatan dalam bidang pertanian yang tertuang dalam AoA.

Upaya negara berkembang dalam memperjuangkan kepentingan di bidang pertanian mulai menarik perhatian dunia pada Putaran Doha, Qatar tahun 2001. Pada putaran ini negara-negara berkembang mulai menyatukan suara mereka terkait masih besarnya subsidi yang diberlakukan oleh negara maju.

Negara-negara berkembang mulai menyuarakan tuntutan dan kepentingan mereka terhadap negara maju untuk menghentikan pemberian subsidi bagi pertanian mereka, serta menuntut adanya penghapusan proteksi mereka terhadap produk pertanian negara berkembang. Mengingat kekuatan yang dimiliki negara-negara berkembang relatif kecil mengakibatkan negara-negara berkembang mulai bertindak dalam sebuah koalisi untuk memenangkan tuntutan dan kepentingan mereka. Koalisi digunakan sebagai jembatan bagi negara-negara berkembang untuk mendapatkan pengaruh, posisi serta suara di tiap negosiasi WTO. Koalisi negara berkembang yang terbentuk pada masa setelah Putaran Doha semakin kuat, ketika ekonomi dari sebagian negara berkembang mengalami pertumbuhan positif dan masuk dalam jajaran *emerging market* yang mampu mengubah jalannya peta negosiasi dalam WTO.

Penerapan Berbeda Agreement on Agriculture (AoA) di Negara Maju dan Negara Berkembang

AoA merupakan kesepakatan dalam bidang pertanian yang dihasilkan pada Putaran Uruguay dan mulai berlaku pada 1 Januari 1995. Tujuan AoA adalah untuk melakukan reformasi perdagangan sektor pertanian dan membuat kebijakan-kebijakan yang adil serta lebih berorientasi pasar dengan menekankan pada liberalisasi terhadap perdagangan pertanian. Di dalam AoA telah ditetapkan sejumlah peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan perdagangan pada bidang pertanian yang meliputi akses pasar yang tercantum dalam pasal IV, komitmen dukungan domestik pada pasal VI, dan komitmen subsidi ekspor dalam pasal IX. Sejak disepakatinya AoA pada tahun 1995, negara anggota wajib mematuhi kesepakatan yang telah ada dengan komitmen wajib menurunkan subsidi (Ghazalian & Cardwell 2010). Komitmen untuk menurunkan dan mengurangi subsidi pada kenyataannya jauh dari yang diharapkan oleh negara anggota terutama negara berkembang. Di negara-negara OECD, dukungan pertanian dalam bentuk subsidi dan mekanisme lainnya mencapai US\$ 33 ribu untuk pertanian di Jepang dan US\$ 30 ribu untuk Uni Eropa dan Amerika Serikat.

Subsidi yang terus diberikan oleh negara maju terhadap pertanian mereka berdampak pada terjadinya distorsi harga di pasar internasional yang merugikan petani miskin di negara berkembang. Menurut sekretariat WTO ekspor pertanian negara berkembang di pasar dunia tidak mengalami perubahan sejak 1990. Sesudah diterapkannya AoA, negara-negara OECD masih tetap memberikan subsidi bagi petani mereka, bahkan tercatat pada tahun 1999 subsidi tersebut meningkat hampir 3 persen. Hingga tahun 2001 tercatat subsidi dari negara-negara OECD pada petani sebesar US\$ 311 miliar atau sekitar US\$ 850 juta per hari. Selain itu, keberadaan subsidi juga berdampak pada sulitnya produsen negara berkembang untuk bersaing dengan produk hasil pertanian negara-negara maju, yang berdampak pada rusaknya pendapatan petani di negara-negara miskin. Pemberlakuan subsidi oleh negara maju juga berdampak pada hilangnya pendapatan negara berkembang, dari sektor pertanian dan industri pengolahan hasil pertanian sebesar US\$ 24 miliar, serta lebih dari US\$ 40 miliar gagal didapatkan karena berkurangnya ekspor hasil pertanian (Diao et al. 2003).

Perjanjian ini gagal untuk mengenali perbedaan mendasar antara sistem pertanian di negara-negara maju dan berkembang. Perjanjian ini mengabaikan fakta bahwa pertanian merupakan sumber utama mata pencaharian bagi mayoritas penduduk dan menyumbang 26 persen PDB bagi pendapatan nasional di negara-negara berkembang. Sementara bagi negara maju, pertanian hanya menyumbang 3 persen dari total PDB. Kebijakan AoA yang mensyaratkan bahwa subsidi dan pembatasan impor harus dikurangi sebanyak 36 persen dan 20 persen memberikan beban tersendiri bagi negara berkembang. Hal ini karena tingkat subsidi dan tarif impor negara berkembang adalah sepertiga dari ketentuan tersebut, artinya negara-negara berkembang tidak dapat menggunakan tarif tinggi dan subsidi lebih besar di masa mendatang, tetapi justru harus menurunkannya. Sebaliknya bagi negara-negara maju, praktik pemberlakuan subsidi dan tarif tinggi masih dilaksanakan. Meskipun mereka dituntut untuk menurunkan subsidi, penurunan tersebut tidak terlalu berdampak besar terhadap pertanian mereka (Jahamtani 2005). Di samping itu, tidak adanya komitmen dari negara-negara maju terkait penghapusan tarif dan subsidi menjadikan kesepakatan ini menjadi tidak efektif terutama dalam meredam distorsi harga akibat penerapan subsidi.

Tidak ditemukannya kesepakatan dalam AoA, membawa pemerintah negara-negara berkembang untuk bergerak aktif memperjuangkan kepentingannya. Ini dapat dilihat dari partisipasi negara berkembang dalam negosiasi WTO yang berubah cukup radikal, dengan peningkatan kualitas dan kuantitas keterlibatan mereka terutama sesudah AoA terbentuk pada masa Putaran Uruguay. Sebelum Putaran Uruguay, sebagian besar negara berkembang mengikuti substitusi impor dan kebijakan perdagangan terbatas lainnya, dan akibatnya negara-negara berkembang tidak aktif dalam GATT. Akan tetapi setelah Putaran Uruguay dan kebijakan luar negeri negara berkembang sudah berorientasi keluar, partisipasi negara-negara tersebut menjadi aktif dalam perdagangan dunia maupun dalam berbagai negosiasi terutama setelah GATT bertransformasi jadi WTO. Negara-negara berkembang mulai mengakui pentingnya posisi pra-putaran setelah pengalaman mereka dalam Putaran Uruguay dengan mulai bergabung dan membentuk koalisi. Koalisi disini dibutuhkan untuk memperkuat posisi mereka sebagai persiapan dalam berbagai Konferansi Tingkat Menteri (KTM) WTO seperti KTM Singapura 1996, KTM Seattle tahun 1999, KTM Doha tahun 2001, dan KTM Cancun 2003 (Rolland 2007).

Peran G20 dalam Negosiasi Cancun

Tidak ditemukannya penyelesaian terkait masalah subsidi dalam AoA berdampak pada munculnya perlawanan dari negara anggota terutama negara-negara berkembang. Perlawanan negara-negara tersebut mulai menarik perhatian saat Putaran Doha 2001, ketika negara-negara berkembang mengajukan proposal personal untuk mencapai kepentingan mereka. Banyaknya tuntutan personal yang diajukan terhadap WTO mengakibatkan Putaran Doha mengalami *deadlock*. *Deadlock* putaran Doha membawa kembali negara-negara anggota WTO untuk duduk dalam negosiasi, akan tetapi sesudah Putaran Doha negara-negara berkembang mulai terlibat dalam berbagai koalisi yang disesuaikan dengan kepentingan mereka. Koalisi merupakan gabungan dari orang-orang ataupun organisasi yang bekerja untuk memengaruhi hasil pada suatu masalah tertentu.

Menurut Narlikar (2005), koalisi merupakan satu-satunya instrumen yang dapat meningkatkan posisi tawar mereka karena keterbatasan yang dimiliki oleh negara-negara berkembang dalam hal kekuatan diplomatik dan legitimasi. Keuntungan yang akan didapat adalah negara berkembang dan kecil dapat meningkatkan posisi tawar serta dapat menekan legitimasi klaim mereka, memfasilitasi pembagian kerja serta pertukaran informasi di antara negara-negara berkembang, dan dalam proses perdagangan multilateral, negara-negara berkembang dapat meningkatkan BATNA (*Best Alternative to Negotiated Agreement*) untuk meningkatkan kekuatan untuk menekan lawan (Narlikar 2005).

Sejak tahun 1970 sampai 1980-an, negara-negara berkembang telah terlibat dalam berbagai koalisi terutama pada era GATT. Akan tetapi, koalisi pada saat itu masih dipengaruhi oleh berbagai latar belakang seperti kesamaan sejarah masa kolonialisme dan ideologi. Koalisi pada masa itu sering mengalami kegagalan akibat kompleksitas isu yang diusung, adanya kecenderungan dari koalisi untuk memblokir negosiasi yang tidak diimbangi dengan legitimasi, serta solidaritas anggota yang kurang menyebabkan koalisi mudah ditekan oleh negara-negara maju. Belajar dari kegagalan tersebut, negara-negara berkembang mulai menata kembali strategi mereka, hingga kemudian menghasilkan apa yang disebut oleh Narlikar dan Tussie (2004) sebagai "*smart coalitions of the third generations*". Ini menggabungkan beberapa elemen koalisi, yang didasarkan atas kesamaan ideologi dan biasanya disatukan karena norma-norma keadilan, pemerataan, dan keadilan distributif dalam perdagangan internasional. Lebih lanjut Narlikar (2005) menekankan bahwa kesuksesan sebuah koalisi bergantung pada isu yang diusung, karena hal tersebut akan menentukan solid atau tidaknya anggota dalam koalisi. Koalisi pada dasarnya seringkali menghadapi fragmentasi terutama jika koalisi mengusung lebih dari satu isu. Ancaman bagi kekompakan dalam koalisi sering dijelaskan dengan efek domino. Terlihat ketika satu negara memutuskan untuk meninggalkan koalisi dan lebih memilih berkompromi terhadap tawaran lawan. Hal ini berdampak terhadap negara-negara anggota lain yang menyebabkan koalisi runtuh (Narlikar & Tussie 2004).

Penggabungan jenis koalisi yang disebutkan oleh Narlikar dan Tussie (2004) dapat dilihat dalam koalisi G20. G20¹ merupakan koalisi yang terdiri dari kumpulan negara-negara berkembang yang muncul sebagai respon terhadap *joint proposal* AS dan UE pada Putaran Cancun. Fokus dari isu yang diusung G20 adalah pertanian dengan berusaha memperjuangkan kepentingan negara berkembang dengan tuntutan terkait pengurangan subsidi di negara maju. Sehingga penggabungan tersebut menghasilkan strategi defensif yang merupakan varian dari strategi distributif (Odell & Mena 2004). Strategi distributif dalam pelaksanaannya dapat menggabungkan peringatan seperti ancaman untuk menghalangi konsensus atau melakukan *walk out* dengan menghentikan negosiasi. Strategi ini efektif jika pihak-pihak yang terlibat dalam koalisi memiliki kohesi yang kuat dan sikap defensif. Sikap defensif yang diterapkan oleh G20 antara lain dengan tidak melakukan kompromi sedikit pun dengan *joint proposal* Amerika Serikat-Uni Eropa. Sikap tersebut didukung dengan mengajukan proposal tandingan yang berisi tuntutan penurunan tarif yang memungkinkan akses pasar lebih baik bagi produk pertanian negara berkembang (produk tropis harus diberikan akses bebas pajak untuk negara maju), serta menentukan tenggat waktu terhadap pelaksanaan eliminasi semua subsidi ekspor. Selain itu juga ditekankan perlunya pemberian perlakuan khusus dan berbeda terhadap kebutuhan negara-negara berkembang (WTO 2003). Strategi ini semakin efektif mengingat G20 yang terdiri dari negara-negara berkembang dengan jumlah populasi penduduk besar, meliputi hampir 60 persen total populasi dunia dan 70 persen populasi pertanian dunia mampu menyumbang 21 persen dari PDB pertanian dunia (Jank & Jales 2005). Sehingga dengan keadaan tersebut posisi koalisi diuntungkan dengan kepentingan dari kurang lebih 60 persen kepentingan populasi dunia.

Putaran Cancun berakhir tanpa menghasilkan apapun dan ini diakibatkan karena kuatnya posisi koalisi. Ini merupakan kemenangan tersendiri bagi koalisi, karena untuk pertama kalinya dalam sejarah koalisi, negara berkembang mampu memblokir proposal negara maju.

1 Keanggotaan G20 sendiri terdiri dari 21 negara berkembang seperti: Mesir, Nigeria, Afrika Selatan, Tanzania, dan Zimbabwe dari Afrika; Tiongkok, India, Indonesia, Pakistan, Filipina dan Thailand dari Asia; Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Kuba, Guatemala, Meksiko, Paraguay, Uruguay, dan Venezuela dari Amerika Latin : www.g-20.mre.gov.br/history.asp, diakses 19 Desember 2014.

Selain itu yang menarik pada koalisi ini bukanlah hasil akhir, melainkan fakta bahwa untuk pertama kalinya koalisi ini mampu untuk terus bersama hingga putaran akhir dan mampu bertahan meskipun berada di bawah tekanan Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang. Kuatnya koalisi ini juga tidak lepas dari performa negara-negara inti seperti India dan Brasil yang mampu menyeimbangkan kepentingan yang berbeda-beda dari negara anggota dalam memimpin koalisi. Di samping itu, pertumbuhan ekonomi positif yang dicapai oleh anggota koalisi mampu memperkuat solidaritas koalisi.

Pengaruh *Emerging Market* dalam WTO

Dalam dekade terakhir penelitian yang dilakukan oleh Monika Srivastava (2004) menunjukkan, kebijakan dan penelitian akademis telah banyak membahas peran baru dari negara-negara berkembang dalam perekonomian dan pemerintahan global. Peran baru tersebut biasanya diukur dari meningkatnya kapasitas ekonomi dan militer serta aspirasi politik mereka dalam pemerintahan global. Peningkatan kapasitas ekonomi di dalam negara berkembang biasanya dikategorikan dalam kategori *emerging market*. Keberadaan *emerging market* mampu mengubah komposisi distribusi kekuasaan dalam negosiasi WTO. Dengan munculnya *emerging market*, keputusan WTO yang sebelumnya didominasi oleh kekuatan bipolar (Amerika Serikat-Uni Eropa) mulai mengalami perubahan ke arah multipolar. Hal tersebut dapat dilihat sejak Konferensi Tingkat Menteri di Cancun. Sejumlah keputusan besar memerlukan persetujuan dari beberapa negara termasuk Brasil dan India. Perubahan komposisi kekuatan juga ditentukan dengan meningkatnya partisipasi negara menengah dan kecil dengan berusaha untuk memengaruhi proses melalui ide-ide dan membangun koalisi (Cottier 2009).

Tahun 2000 menjadi tolak ukur dari berkembangnya partisipasi negara-negara berkembang dalam perdagangan dunia dengan munculnya sejumlah kekuatan baru seperti Brasil, India, serta akses Tiongkok ke WTO yang mampu mengubah struktur negosiasi dan ekonomi global terutama komposisi kekuatan di dalam negosiasi WTO.

Masuknya ketiga negara dalam jajaran *emerging market* dengan pertumbuhan ekonomi yang positif mampu memberikan kontribusi tersendiri terkait dengan pengurangan kesenjangan PDB antara negara maju dan berkembang (*North-South*). Selain itu, Tiongkok, India, dan Brasil muncul menjadi negara yang memiliki saham terbanyak di antara negara berkembang lainnya dalam perdagangan dunia. Tercatat hingga tahun 2009, gabungan saham ketiga negara dalam perdagangan dunia mencapai 11,8%, meningkat tiga kali lipat yang sebelumnya hanya mencapai 3,3% di tahun 2000. Tren positif ketiga negara tersebut mampu memengaruhi peningkatan perdagangan negara-negara berkembang lainnya meskipun dalam tingkatan lebih kecil dibandingkan ketiga negara (Wang, et.al. 2011). Adanya motif perdagangan tersebut kemudian mendorong ketiga negara membangun aliansi berkelanjutan untuk negosiasi perdagangan multilateral, terutama setelah melihat kegagalan WTO dalam mencapai kesepakatan pada saat Putaran Doha. Kesamaan motif dan minat mendorong koalisi berfungsi sebagai instrumen penting mengaktifkan diplomasi perdagangan.

Keberadaan ketiga negara dalam koalisi mampu meningkatkan legitimasi daya tawar yang dimiliki oleh negara-negara berkembang selama negosiasi. Bahkan selama dan setelah KTM Cancun, beberapa kalangan memandang G20 mewakili pergeseran kekuatan utama dalam perdagangan global. Beberapa kalangan tersebut bahkan melihat G20 sebagai dinamo kebangkitan tata kelola ekonomi baru, dengan Brasil, Tiongkok, dan India sebagai kunci kekuatan perdagangan global (Bello & Kwa 2004). Meskipun pada dasarnya G20 tidak merasa seperti penilaian tersebut (Delgado & Soares 2005).

Meskipun ketiga negara tidak merepresentasikan kekuatan blok baru, namun keberadaan negara-negara tersebut mampu memberikan pengaruh terhadap posisi kekuatan global. Bahkan dengan kekuatan ekonomi mereka, peranannya dalam berbagai lembaga transnasional seperti WTO menjadi lebih tegas. Keberadaan mereka dalam koalisi menjadi kelompok tawar efektif yang mewakili negara-negara berkembang. Konvergensi kepentingan antara tiga negara pada sejumlah besar masalah ekonomi dan tema umum melawan kebijakan proteksionis dari UE dan AS pada perundingan WTO menjadi salah satu fenomena berbeda dari sebelum negara-negara tersebut masuk dalam kategori *emerging market*.

Brasil dan India merupakan negara paling aktif dalam WTO dibanding dengan anggota negara berkembang yang lain. Kemitraan kedua negara sudah terjalin pada saat keterlibatannya dalam koalisi GATT, pada era GATT kedua negara telah terlibat aktif dalam berbagai kelompok koalisi negara berkembang. Puncak dari kemitraan kedua negara semakin erat sesudah Putaran Doha terutama terkait pembahasan isu pertanian. Keduanya menjadi motor penggerak dari terciptanya koalisi. Krisis WTO pada Konferensi Tingkat Menteri Cancun 2003 berujung pada terbaliknyanya struktur kekuasaan tradisional dengan melambungkan Brasil dan India ke dalam lingkaran negara-negara yang memiliki pengaruh dalam WTO. Kepemimpinan Brasil dan India khususnya dalam kelompok G20 dipahami sebagai peningkatan kekuasaan mereka di WTO. Dilihat dari sudut pandang kepentingan perdagangan mereka, kemitraan India-Brasil pada dasarnya bertolak-belakang. Hal ini dapat dilihat pada koalisi G20 yang berfokus pada pertanian, sektor dimana kepentingan substansial India dan Brasil berbeda. Brasil cenderung bersikap ofensif dalam setiap negosiasi pertanian dengan membuka peluang untuk melanjutkan liberalisasi pertanian domestik. Sedangkan India dengan populasi sekitar 650 juta petani memiliki kepentingan defensif dan tidak bersedia untuk memungkinkan akses tersebut dibuka (Narlikar 2005). Meskipun terdapat perbedaan kepentingan dalam bidang pertanian, kedua negara mampu memprioritaskan apa yang menjadi kepentingan utama dari anggota koalisi terutama kaitannya dengan masalah subsidi dan tarif. Ini dapat dilihat ketika kedua negara bersatu dalam memblokir *joint proposal* Amerika Serikat-Uni Eropa pada KTM Cancun 2003, tindakan defensif yang dilakukan oleh kedua negara mampu menghentikan langkah Amerika Serikat-Uni Eropa.

Masuknya Tiongkok dalam keanggotaan WTO memiliki pengaruh bagi negosiasi negara berkembang, terutama keputusannya untuk terlibat dalam koalisi. Pencapaian Tiongkok yang bagus dalam perdagangan terlihat pada tahun 1998 meskipun negara ini masih memberlakukan proteksi tetapi mampu menempati urutan kesembilan ekonomi terbesar dunia. Aksesinya Tiongkok ke WTO memiliki makna yang luas baik bagi Tiongkok maupun seluruh dunia. Hal ini tidak lepas dari kebangkitan Tiongkok dalam hal ekonomi, tingkat pertumbuhan yang cepat, serta kekuatan finansial yang cukup besar, mampu menarik sebagian besar perhatian dunia.

Bergabungnya Tiongkok dengan WTO pada dasarnya memiliki kepentingan yang sama seperti negara-negara berkembang lainnya. Ini berimplikasi positif bagi perkembangan perdagangan di negara berkembang. Hal ini karena pasar konsumen yang besar dari 1,2 miliar penduduk Tiongkok akan mampu meningkatkan daya tawar dalam negosiasi.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa daya tawar dalam negosiasi WTO ditentukan oleh kombinasi populasi, kekayaan dan volume perdagangan. Maka dengan terlibatnya tiga negara ini dalam koalisi mampu mengimbangi kekuatan yang dimiliki negara maju karena masing-masing negara dalam perdagangan internasional memainkan sektor-sektor dominan seperti pada komoditas pertanian, barang-barang manufaktur dan jasa. Sebagai contoh Brasil saat ini menjadi salah satu produsen pertanian yang paling kompetitif di dunia dan eksportir terkemuka dari sejumlah besar produk seperti daging sapi, gula, etanol, jagung, kapas, dan lainnya. Selain itu Brasil merupakan eksportir ketiga pertanian terbesar di dunia setelah Amerika Serikat dan Uni Eropa dengan surplus pertanian terbesar. Agribisnis mampu menyumbang 28 persen dari PDB Brasil (Hopewell 2010). Ini yang kemudian menjadikan Brasil mengadopsi posisi agresif di WTO dan muncul sebagai salah satu pendukung paling aktif dan vokal pada Putaran Doha.

Sedangkan sektor dominan Tiongkok dalam perdagangan internasional terletak pada manufaktur. Ekspor manufaktur Tiongkok telah mengalami kemajuan pesat dalam beberapa dekade terakhir. Semenjak transisi ekonomi yang terjadi pada tahun 1978, ekspor Tiongkok berkembang pesat dan semakin dipercepat setelah menjadi anggota WTO pada tahun 2001. Bahkan dalam tiga dekade terakhir, Tiongkok dengan cepat menjadi "*workshop of the world*" sebagai negara eksportir produsen dan barang terbesar kedua setelah Amerika Serikat. Bagi India sektor dominan dalam perdagangan terletak pada jasa dan ekspor yang mampu mendorong pesatnya pertumbuhan ekonomi India. Dalam dua dekade terakhir ekspor jasa India menjadi yang tercepat dengan pertumbuhan sekitar 35 persen pertahun, ini kemudian mendorong India muncul sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia (WTO 2009).

Di samping itu masuknya ketiga negara dalam kelompok BRIC (Brasil, Rusia, India, Tiongkok)² semakin menguatkan posisi mereka dalam perekonomian global. Bahkan dalam laporan Goldman Sach pada tahun 2003, keempat negara akan mendominasi perekonomian global. Argumen utamanya adalah karena pertumbuhan rata-rata keempat negara yang mencapai kurang lebih 7 persen tiap tahunnya serta mampu mendorong pertumbuhan PDB dunia hingga 10 persen. Bahkan pada tahun 2050, kekuatan ekonomi negara-negara tersebut akan mampu melampaui kekuatan ekonomi Amerika Serikat dan negara-negara Eropa lainnya (Wilson & Purushotman 2003). Kuatnya posisi ketiga negara dalam perekonomian global serta diplomasi proaktif yang dilakukan oleh Brasil, Tiongkok, dan India dalam negosiasi WTO mampu memberikan beban moral tersendiri bagi negara maju dan mempengaruhi struktur proses negosiasi. Klaim mereka di dalam koalisi sebagai perwakilan negara berkembang dengan mewakili kepentingan lebih dari setengah populasi dunia serta menguasai 69 persen pertanian dunia, mampu menguatkan posisi tawar mereka dalam negosiasi.

Kesimpulan

Sebelum Putaran Doha, peran dan posisi negara berkembang dalam WTO sangatlah minim. Sehingga kontribusi terhadap pembuatan keputusan di WTO selalu di dominasi oleh negara-negara maju seperti Amerika Serikat-Uni Eropa. Akibat dominasi tersebut banyak di antara kepentingan negara-negara berkembang tidak masuk dalam agenda negosiasi, yang kemudian berujung pada kerugian yang dialami oleh negara berkembang. Posisi dan peran tersebut mulai berubah ketika ekonomi negara-negara berkembang mulai mengalami pertumbuhan yang signifikan dengan beberapa negara masuk dalam jajaran *emerging market*. Hal ini terlihat sejak Putaran Doha, negara-negara berkembang mulai berpartisipasi aktif dan menyuarakan kepentingan mereka dalam berbagai negosiasi. Keaktifan dari negara-negara berkembang tersebut membuat mereka bersatu dalam sebuah koalisi G20.

2 Sebelum Afrika tergabung dalam kelompok dan Rusia yang masih belum menjadi anggota tetap WTO

Koalisi ini cenderung memiliki perbedaan besar dari koalisi negara berkembang sebelumnya. Koalisi ini dihuni oleh jajaran negara *emerging market* (Brasil, Tiongkok, India) sehingga daya tawar dari koalisi berlipat di samping ketiga negara juga mewakili kepentingan lebih dari setengah populasi dunia serta menguasai 69 persen pertanian dunia. Adanya faktor-faktor tersebut berujung pada kesuksesan koalisi dalam membendung ambisi negara maju pada saat negosiasi.

Daftar Pustaka

Buku dan Artikel dalam Buku

- Jahamtani, Hira, 2005. *WTO dan Penjajahan Kembali Dunia Ketiga*, Yogyakarta: Insist Press.
- Karns, Margaret P., & K.A. Mingst, 2004. *The Roles of State in Global Governance*, dalam *International Organizations: the Politics dan Processes of Global Governance*. Boulder: Lynne Rienner Publisher.
- Stiglitz, Joseph, 2002. *Globalization dan Discontent*, New Jersey: Norton Company.

Artikel Jurnal dan Jurnal Elektronik

- Delgado, N.G., & A. Soares, 2005. *The G20: Its Origin, Evolution, Meaning dan Prospect*, *Global Issue Papers*, 25.
- Diao, Xinshen, et al., t.t. *The Impact of Agriculture Trade Policies on Developing countries*, *International Food Policy Research Institute*, 2003. [online] dalam www.ifpri.org/sites/default/files/pubs/media/trade/trade.pdf. [akses 22 Januari 2015].
- Ghazalian, Pascal L. & Ryan Cardwell, 2010. *Did the Uruguay Round*

- Agreement on Agriculture Affect Trade Flows? An Empirical Investigation for Meat Commodities, International Advances in Economic*, 16 (4) : 333.
- Hopewell, Kristen, 2010. *A Delicate Dance: The Rise of New Developing Country Powers in the Multilateral Trading System*, AGORA Workshop.
- Srivastava, Monika, 2004. *NAM- A Beacon Light for the Third World Today, India Quarterly: A Journal of International Affairs*, 60 (172) : 173.
- Narlikar & Tussie, 2004. *The G20 at the Cancun Ministerial: Developing Countries dan their Evolving Coalitions in the WTO*, *Third World Economy*, 27 (7) : 947-966.
- Narlikar, Amrita, 2005. *Bargaining Over the Doha Development Agenda: Coalitions in the World Trade Organization*, *Latin America Trade Network*.
- Jank, Marcos, & Marion Jales, 2005. *On Product, Box dan Blame-shifting: Negotiating Frameworks for Agriculture in the WTO Doha Round*, *Integration dan Trade Journal*, 22.
- Jones, Kent, 2009. *Green room politics dan the WTO's crisis of representation*, *Progress in Development Studies*, 9 (4) : 349-357.
- Rolland, Sonia E., 2007. *Developing Country Coalitions at the WTO: In Search of Legal Support*, *Harvard International Law Journal*, 48 (2) : 483-551.
- Wang, Jing, et al., 2011. *The Contribution of Tiongkok, India dan Brasil to Narrowing North-South Differences in PDB/Capita, World Trade Shares, dan Market Capitalization*, *National Bureau of Economic Research*. [online]. dalam <http://www.nber.org/papers/w17681>. [diakses 19 Desember 2014].
- Wen, G., 2000. *New frontier of economic globalization: the significance of Tiongkok's accession to WTO*, *Tiongkok Economic Review* 11 : 432-436.
- Wilson, Dominic & Roopa Purushotman, 2003. *Dreaming with BRICs: The Path to 2050*", *Global Economics Paper*, no. 99, vol.1, 2003 [online]. dalam <http://www.goldmansachs.com/our-thinking/archive/archive-pdfs/brics-dream.pdf>. [diakses 28 Desember 2014]

Artikel Daring

- Bello, Walden & Aileen Kwa, t.t. *G20 Leaders Succumb to Divide-and-Rule Tactics: The Story behind Washington's Triumph in Geneva*. [daring]. dalam <http://www.focusweb.org/node/417>. [diakses 20 November 2014].
- Cottier, Thomas, 2009. *A Two-Tier Approach to WTO Decision Making Working Paper No 2009/06, March 2009*. [daring]. dalam http://www.peacepalacelibrary.nl/ebooks/files/NCCR_Cottier_Two-Tier-Approach.pdf [diakses 25 Januari 2015]
- Odell, John, & Antonio Ortiz Mena L.N., 2004. *How to Negotiate Over Trade: A Summary of New research for Developing Countries* [daring]. dalam <http://www-bcf.usc.edu/~enn/text/Odell-Ortiz%20report%20040404.doc> [diakses 28 Desember 2014].

Situs Resmi Daring

- World Trade Organization (WTO), 2003. 'Agriculture – Framework Proposal'. [daring]. dalam http://www.g-20.mre.gov.br/conteudo/proposal_Cancun01.pdf [diakses 19 Desember 2014].

Lain-Lain

- World Trade Organization (WTO), 2009. *World Trade Report 2009*.